

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO

Michael Lokaputra¹⁾, Rita Anugerah²⁾, Pipin Kurnia²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : Lokaputramichael8@gmail.com

The Influence Of Corporate Governance On Risk Management Disclosure

ABSTRACT

Disclosure of risk management is a disclosure of the risks that have been managed by the company or disclosure of how the company will control risks related to the future. The purpose of this study was to determine the effect of corporate governance such as managerial ownership, institutional ownership, independent commissioners, audit committees and risk management committees on risk management disclosure. The population of this study are non-bank financial services companies listed on the Indonesian stock exchange in 2016-2019. The sample selection method was carried out by purposive sampling, namely the method of selecting samples with certain criteria. The sample according to the criteria is 31 companies with an observation period of 4 years so that the research sample is 124. The results of the study indicate that managerial ownership has an effect on risk management disclosure. Institutional ownership factors affect the disclosure of risk management. The independent commissioner factor has no significant effect on risk management disclosure. The audit committee factor has an effect on risk management disclosure. The risk management committee factor has an effect on risk management disclosure.

Keywords : Disclosure of Risk Management, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee, and Risk Management Committee.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan transaksi bisnis menyebabkan semakin kompleksnya risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola segala risiko yang mungkin dihadapi. Menurut COSO ERM framework, risiko adalah peristiwa dengan dampak negatif yang mana dapat menghambat penciptaan nilai dan mengurangi nilai yang ada (COSO, 2004). Oleh karena itu, Manajemen risiko hadir dengan tujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan.

Menurut kerangka COSO ERM framework, Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh jajaran direksi

perusahaan, manajemen dan personil lainnya yang diterapkan dalam perencanaan strategi perusahaan dan dibuat untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dalam mengelola risiko yang dapat ditanggung dan memberikan jaminan pencapaian tujuan perusahaan (COSO, 2004).

Akhir-akhir ini telah terjadi peningkatan perhatian diarahkan pada manajemen risiko yang didorong oleh kompleksitas yang meningkat dalam dunia bisnis dengan tujuan untuk mendorong transparansi dan meningkatkan kualitas pengungkapan sehingga dapat membantu para pengambil keputusan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang semakin berubah. Hal ini menimbulkan banyak permintaan kepada perusahaan

publik untuk memperluas praktik pengungkapan dalam laporan tahunan. Salah satu aspek penting dalam Pengungkapan tersebut adalah pengungkapan manajemen risiko.

Pengungkapan manajemen risiko merupakan pengungkapan atas risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan mengenai cara perusahaan dalam mengendalikan risiko terkait dimasa mendatang (Gunawan dan Zakiyah, 2017). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015, mengklasifikasikan 8 risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank (LJKNB), yaitu: risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, risiko asuransi dan risiko pembiayaan. Sehingga perusahaan wajib menerapkan dan mengungkapkan risiko sesuai dengan peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2015.

Dengan adanya pengungkapan manajemen risiko oleh perusahaan, dapat memberikan informasi kepada stakeholder dalam pengambilan keputusan dan mengurangi adanya asimetris informasi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan (Jannah, 2016).

Namun, dengan adanya kasus yang muncul pada akhir tahun 2019, yang mana terjadi sebagai akibatnya kurangnya pengungkapan dan penerapan atas manajemen risiko. Kasus ini terjadi pada perusahaan Asuransi Jiwasraya, yang mana kerugian sementara yang ditimbulkannya telah mencapai Rp13,7 triliun. Kasus ini diawali dengan adanya gagal bayar Polis JS Saving Plan milik nasabah senilai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober sampai Desember 2019.

Kasus yang menghantam PT Asuransi Jiwasraya murni akibat risiko investasi, beberapa pandangan lain meyakini bahwa ada kemungkinan praktik curang atau tata kelola perusahaan yang buruk di balik investasi saham berisiko tinggi. Bahkan, berdasarkan hasil audit, mereka menemukan bahwa tim investasi Jiwasraya melakukan pembelian saham di perusahaan yang tidak likuid dan tidak didukung

dengan analisis fundamental. sehingga, dapat dilihat bahwa penerapan dan pengungkapan manajemen risiko di PT Asuransi Jiwasraya belum efektif. Tindakan pencegahan dini tidak terjadi walaupun sudah ada indikasi risiko tinggi.

Permasalahan yang terjadi pada perusahaan dapat diatasi dengan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut POJK No.73/Pojk.05/2016, Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran perusahaan dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai etika.

faktor-faktor yang menentukan pengungkapan manajemen risiko dan menemukan bahwa pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan dengan: struktur kepemilikan (Nu Htay *et.al*, 2011 dan Swarte *et.al*, 2019), komisaris independen (Swarte *et.al*, 2019 dan Sanusi *et.al*, 2017), komite audit (Zhang *et. al.*,2013 dan Swarte *et.al*, 2019), dan Komite Manajemen Risiko (Yatim, 2010 dan Ghozali *et.al.*, 2018).

Struktur kepemilikan ada 2 yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang juga menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang tidak benar (Siahaan, 2017). Manajer cenderung akan menjaga kredibilitas perusahaannya dengan mengungkapkan dan menyampaikan laporan keuangan secara

akurat dan tepat waktu serta mengungkapkan dan menerapkan manajemen risiko secara luas (Swarte *et.al.*, 2019). Namun, hal yang berbeda didapat oleh penelitian Nu Htay *et.al.* (2011) yang berpendapat bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. kepemilikan institusional dianggap cukup penting dalam tata kelola perusahaan yang mana dapat bertindak sebagai kontrol pemantauan seperti independensi dewan. Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan lebih besar dalam mempengaruhi kebijakan manajemen risiko perusahaan serta lebih bertanggung jawab atas tekanan eksternal dalam memasang kontrol yang terkait dengan manajemen risiko (Liebenberg dan Hoyt, 2003 dalam Sanusi *et.al.*, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Chariri (2013) yang berpendapat bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Namun penelitian yang dilakukan Nu Htay *et.al.* (2011) berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

Unsur tata kelola perusahaan yang ketiga yaitu dewan komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Siahaan, 2017). proporsi komisaris independen yang lebih tinggi didewan akan menghasilkan pengungkapan yang lebih baik dari aspek material perusahaan.

Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi, karena dewan komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi (Nu Htay *et.al.*, 2011). Hal ini didukung dengan penelitian Swarte *et.al.*, 2019 yang berpendapat bahwa Komisaris independen punya pengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Namun, hal yang berbeda didapat oleh penelitian Sanusi *et.al.* (2017) yang berpendapat bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada penerapan manajemen risiko perusahaan.

Unsur tata kelola perusahaan yang keempat yaitu komite audit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab pada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris. Menurut teori keagenan, komite audit dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko suatu perusahaan karna efektifnya keberadaan dan kinerja komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang *et. al.* (2013) menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun, hal berbeda didapat oleh penelitian yang dilakukan oleh Swarte *et.al.* (2019) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Unsur tata kelola perusahaan yang kelima yaitu komite manajemen risiko. Menurut Surat Edaran Otoritas Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014, Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab pada Dewan Komisaris dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Dengan adanya komite

manajemen risiko diharapkan dapat memberikan lebih banyak waktu dan usaha dalam menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian risiko terkait secara keseluruhan, serta memungkinkan dewan komisaris dalam memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghozali et.al. (2018) yang menyatakan bahwa variabel komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun, hal yang berbeda didapat oleh penelitian Trinanda dan Anisykurlillah (2016) yang menyatakan bahwa komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan makin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan agency theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau sering kita sebut sebagai agency, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (Hamdani, 2016). Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Andrian Sutedi, 2011 dalam Hamdani, 2016).

Jensen dan Mackling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan orang lain agen (manajer) untuk menjalankan aktifitas perusahaannya. Dengan demikian, seorang agen wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh principal kepadanya. Pada perusahaan, hubungan antara principal dan agen diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer (Schroeder *et al*, 2007 dalam Hamdani, 2016).

Pengungkapan Manajemen Risiko

Menurut Hoyt dan Liebenberg (2011) dalam Ardianto (2018), Pengungkapan Manajemen risiko merupakan pengungkapan informasi mengenai pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan dan mengungkapkan dampaknya di masa depan terhadap nilai perusahaan. Pengelolaan dan pengungkapan resiko yang baik kepada publik dapat mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang dihadapi investor serta membantu dalam mengendalikan aktivitas manajemen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015, mengklasifikasikan 8 risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank (LJKNB) sebagai berikut :

1. Risiko Strategi adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama LJKNB.
2. Risiko Operasional adalah Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan LJKNB.
3. Risiko Aset dan Liabilitas adalah Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas LJKNB.

4. Risiko Kepengurusan adalah Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan LJKNB dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
5. Risiko Tata Kelola adalah Risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) LJKNB, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan LJKNB.
6. Risiko Dukungan Dana adalah Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada LJKNB, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
7. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
8. Risiko Pembiayaan adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.

Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa manajemen dapat bertindak sebagai pemilik dan secara langsung

menginstruksikan dan memantau manajemen perusahaan jika mereka memiliki saham. Oleh karena itu, dapat mengurangi masalah keagenan dibandingkan dengan situasi di mana para manajemen, yang bukan pemilik, mengawasi manajemen perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Swarte *et.al.* (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun, penelitian yang dilakukan Roberto dan Taringan (2013) yang berpendapat bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis pertama adalah:

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko

Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan manajemen risiko perusahaan lebih cenderung bertanggung jawab atas tekanan eksternal untuk memasang kontrol yang terkait dengan manajemen risiko suatu perusahaan (Sanusi *et.al.*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Chariri (2013) yang berpendapat bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Zakiyah (2017) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis kedua adalah:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

Komisaris Independen dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Desender dan Lafuente (2009 dalam Swarte *et.al*, 2019) menjelaskan dengan adanya komisaris independen sebagai media dalam meningkatkan kualitas pemantauan terhadap perencanaan dan implementasi manajemen risiko yang kemudian berdampak pada pencegahan terhadap kecurangan, dan perilaku oportunistik dari pihak manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Nu Htay *et.al*. (2011) berpendapat bahwa Komisaris independen punya pengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen resiko perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Chariri (2013) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis ketiga adalah:

H3 : Komisaris independen berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko

Komite Audit dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam peraturan tersebut terdapat persyaratan yang lebih ketat atas keanggotaan komite

audit dan adanya tugas dan tanggung jawab yang lebih besar yang harus ditanggung oleh komite audit. Aturan tersebut mengindikasikan diperlukannya komite audit yang lebih kompeten dan peran komite audit dalam memastikan kualitas tata kelola perusahaan dan pengawasan terhadap aktivitas manajemen risiko menjadi semakin dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zhang *et. al*. (2013) menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Swarte *et.al*. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Bedasarkan penelitian diatas, maka hipotesis keempat adalah:

H4 : komite audit berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko

Komite Manajemen Risiko dan Pengungkapan Manajemen Risiko

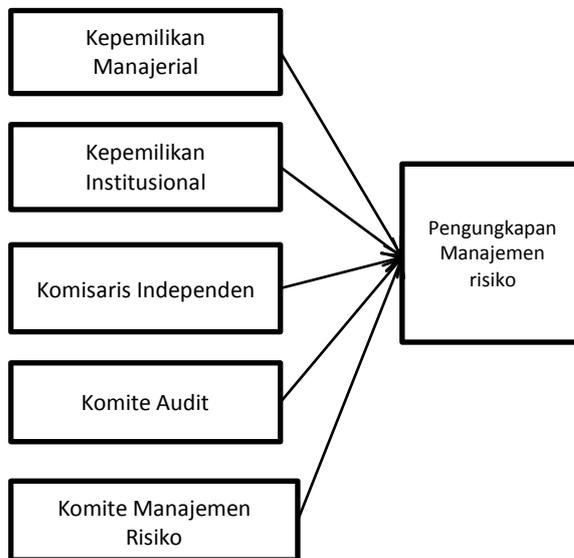
Komite manajemen risiko adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan terjadinya potensi risiko perusahaan. Oleh karena itu, dalam konteks praktik tata kelola perusahaan yang baik, karakteristik yang berkontribusi terhadap efektivitas komite audit cenderung dikaitkan secara positif dengan pembentukan komite manajemen risiko (Yatim, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) menyatkan bahwa komite manajemen risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Trinanda dan Anisykurlillah (2016) yang menyatakan bahwa komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis kelima adalah:

H5 : Komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Model Penelitian

Gambar 1 Model Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan Jasa Keuangan Non-perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2019. Sedangkan metode penentuan sampel adalah *Purposive sampling*, sehingga Sampel yang sesuai dengan kriteria berjumlah 31 perusahaan dengan masa observasi 4 tahun sehingga sampel penelitian berjumlah 124 perusahaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan laporan tahunan perusahaan jasa keuangan non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan (Sugiyono, 2017:225) yaitu dengan mengumpulkan data laporan Tahunan perusahaan sampel dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia <http://www.idx.co.id>.

Defenisi Operasional Variabel

Pengungkapan Manajemen Risiko

Dalam penelitian ini, Pengungkapan Manajemen Risiko diukur dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 /SEOJK.05/2016 tentang pedoman penerapan manajemen risiko dan laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang setidaknya memiliki enam komponen untuk diungkapkan. 6 komponen risiko tersebut adalah: risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, dan risiko dukungan dana. Pengukuran menggunakan pendekatan indeks sehingga setiap item pengungkapan manajemen risiko yang diungkapkan diberi nilai 1 dan nilai 0 (nol) apabila tidak diungkapkan. Setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan indeks pengungkapan manajemen risiko masing-masing perusahaan. Perhitungan indeks dalam pengungkapan manajemen risiko perusahaan, dirumuskan sebagai berikut:

$$Disclosure = \frac{\text{Total Seluruh Item Pengungkapan}}{\text{Jumlah Item}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan yang secara aktif turut membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan, yang meliputi direksi dan komisaris. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Persentase jumlah saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional yang memiliki kemampuan

lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan manajemen risiko perusahaan lebih cenderung bertanggung jawab atas tekanan eksternal untuk memasang kontrol yang terkait dengan manajemen risiko suatu perusahaan (Sanusi *et.al.*, 2017). Pengukuran Kepemilikan Institusional menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Persentase jumlah saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemangku kepentingan, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam berperilaku independen atau bertindak demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen dihitung berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan berdasarkan sampel.

Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab pada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris. Aturan tersebut mengindikasikan diperlukannya komite audit yang lebih kompeten dan peran komite audit dalam memastikan kualitas tata kelola perusahaan menjadi semakin dibutuhkan.

Jumlah anggota komite audit juga menjadi hal yang penting. Seberapa efektif komite audit dapat berjalan dengan adanya jumlah anggota komite audit, karena tingkat efektivitas komite Audit juga dapat dinilai dari jumlah anggota Komite Audit. Dalam penelitian ini komite audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan.

Komite Manajemen Risiko

Komite manajemen risiko adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan terjadinya potensi risiko perusahaan. tujuan pembentukan komite ini untuk membantu dewan direksi mengelola risiko, menetapkan kebijakan risiko yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, komite manajemen risiko diukur dengan variabel dummy yaitu jika perusahaan memiliki komite manajemen risiko maka 1 dan 0 jika tidak.

Analisis Regresi Berganda

Analisis linear berganda digunakan dengan maksud memperkirakan bagaimana keadaan variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen dimanipulasi (Sugiyono, 2017). Analisis ini menggunakan teknik analisis statistik SPSS dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Pengungkapan Manajemen risiko

α : Konstanta

β : Koefisien variabel

X1 : Kepemilikan Manajerial

X2 : Kepemilikan Institusional

X3 : Komisaris Independen

X4 : Komite Audit

X5 : Komite Manajemen Risiko

ϵ : Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statisitik Deskriptif

Terdapat 6 variabel dalam penelitian ini yaitu: pengungkapan manajemen risiko, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan komite manajemen risiko.

Berikut adalah statistik deskriptif dari sampel penelitian tahun 2016-2019:

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviasi
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Risk Disclosure	124	0,60	1,00	0,8471	0,15184
Manajerial	124	0	0,5825	0,031158	0,1073176
intitusion al	124	0,1024	0,9500	0,656626	0,2134688
Komisaris	124	0,25	0,75	0,4607	0,12487
Audit comitte	124	2	4	3,00	0,285
RMC	124	0	1	0,53	0,501
Valid N (listwise)	124				

Sumber : Data Olahan, 2021

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi yang dibuat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ketika memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal, jika tidak normal maka prediksi yang dilakukan dengan model tersebut dapat menyimpang. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan *one-sample* Kolmogorov Smirnov Test:

Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		124
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,18547951
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,064
	Positive	0,064
	Negative	-0,059
Test Statistic		0,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji *One-Sample* Kolmogorov-Smirnov Test (KS) didapatkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi mengikuti sebaran normal, sehingga asumsi normalitas residual terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dalam penelitian ini dengan melihat (1) matrik korelasi antar variabel-variabel independen (termasuk variabel kontrol), (2) nilai tolerance, dan (3) *variance inflation factor* (VIF). Indikator tersebut untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika besaran korelasi matrik yang berada diantara variabel independen >0,90, nilai tolerance > 0,10, dan nilai VIF <10. Hasil pengujian Multikolinearitas dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant) ^a		
	ABS_INS	0,772	1,295
	ABS_MAJ	0,950	1,053
	ABS_kom	0,837	1,194
	Audit Committee	0,869	1,151
	RMC	0,912	1,097

a. Dependent Variable: ABS_RD

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa uji multikolinieritas yang dilakukan pada seluruh variabel independen dalam penelitian menghasilkan nilai Tolerance > 0,01 dengan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas

Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas yaitu suatu pengujian untuk menguji apakah variabel-variabel yang dioperasikan sudah mempunyai varian yang sama (homogen) atau sebaliknya (heterogen) dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan metode Glejtser. Metode ini dapat dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan pada variabel terikat maka tidak ada heteroskedastisitas.

Hasil pengujian Heteroskedastisitas dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4 Uji heterokedastisitas

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-0,506	0,614
	ABS_INS	2,404	0,178
	ABS_MAJ	-0,504	0,615
	ABS_kom	1,333	0,185
	AD	0,210	0,834
	RMC	-0,077	0,939

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 4 tampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai signifikansi $> \alpha$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yaitu pengujian untuk menguji apakah dalam model regresi linear adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,2013), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dapat digunakan dengan Uji Durbin-Watson (DW-test). Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah apabila angka yang ditunjukkan dari nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas (du) dan lebih kecil dari 4-du ($du < d < 4-du$). Hasil pengujian Autokorelasi dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5 Uji autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,723 _a	0,523	0,502	0,18937	2,169

a. Predictors: (Constant), RMC, ABS_kom, ABS_MAJ, AD, ABS_INS

b. Dependent Variable: ABS_RD

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 5 di atas nilai Durbin Watson sebesar 2.169, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 124 (n), dan jumlah variabel independen 5 (k=5), maka di tabel DurbinWatson akan didapat nilai du sebesar 1,79. Karena nilai DW 2,169 lebih besar dari batas atas (du) 1,7 dan kurang dari 2,21 ($4 - 1.79$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Uji Persamaan Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Beta			
1	(Constant)	0,899	3,442	0,001	
	ABS_MAJ	0,00051	0,172	2,641	0,009
	ABS_INS	0,351	0,235	3,241	0,002
	ABS_KOM	-0,289	-0,098	1,414	0,160
	AC	-0,156	-0,166	2,433	0,016
	RMC	-0,296	-0,552	8,294	0,00017

a. Dependent Variable: ABS_RD

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 6 di atas maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut :

$$ABS_RD = 0,899 + 0,00051 ABS_MAJ + 0,351 ABS_INS - 0,289 ABS_KOM - 0,156 AD - 0,296 RMC + \epsilon$$

Uji Hipotesis

Analisis Koefisien Determinasi

Untuk menguji model penelitian ini dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Semakin mendekati 1 maka nilai

regresi tersebut semakin baik. Hasil Analisis Koefisien Determinasi yaitu:

Tabel 7 Uji koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,723 ^a	0,523	0,502	0,18937

a. Predictors: (Constant), RMC, ABS_kom, ABS_MAJ, AD, ABS_INS

Sumber : *Data Olahan, 2021*

Berdasarkan Tabel 7 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (*R-Square*) menunjukkan nilai 0,523 atau 52,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan komite manajemen risiko mampu menjelaskan variabel dependen pengungkapan manajemen risiko sebesar 52,3%, sedangkan sisanya 47,7% (100% - 52,3%) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Untuk melakukan pengujian terhadap masing-masing hipotesis, maka akan digunakan uji regresi parsial (uji t) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu atau parsial, apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai ttabel dalam penelitian ini ditunjukkan dengan $df = n - k - 1 = 124 - 5 - 1 = 118$ dengan taraf signifikansi 0,05 maka ttabel yang didapat adalah 1,980. Berikut ini adalah hasil pengujian masing-masing hipotesis:

Tabel 8 Hasil Uji t

Variabel	Koefesien Regresi	t hitung	t tabel	Sig.
Kepemilikan manajerial	0,00051	2,641	1,980	0,009
Kepemilikan institusional	0,351	3,241	1,980	0,002
Komisaris independen	-0,289	-1,414	-1,980	0,160
Komite audit	-0,156	-2,433	-1,980	0,016
Komite manajemen risiko	-0,296	-8,294	-1,980	0,00017

Sumber : *Data Olahan, 2021*

PEMBAHASAN

Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 8 didapat nilai t hitung senilai 2,641. Nilai t tabel sebesar 1,980, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 118 ($df = n - k - 1$). Dengan demikian diketahui t hitung adalah $2,641 > t$ tabel 1,980. Maka dapat disimpulkan H1 diterima yaitu Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Hasil ini juga terbukti dari nilai Sig. 0,009 yang berarti Sig. $0,009 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 8 didapat nilai t hitung senilai 3,241 Nilai t tabel sebesar 1,980 diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 118 ($df = n - k - 1$). Dengan demikian diketahui t hitung adalah $3,241 > t$ tabel 1,980. Maka dapat disimpulkan H2 diterima yaitu Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Hasil ini juga terbukti dari nilai Sig. 0,002 yang berarti Sig. $0,002 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

Komisaris Independen dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 8 didapat nilai t hitung senilai -1,414 Nilai t tabel sebesar 1,980, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 118 ($df = n - k - 1$). Karna nilai dari t hitung diambil dari nilai

mutlaknya, dengan demikian diketahui t hitung adalah $1,414 < t$ tabel $1,980$. Maka dapat disimpulkan H3 ditolak yaitu komisaris independen berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Hasil ini juga terbukti dari nilai Sig. $0,160 > 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

Komite Audit dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 8 didapat nilai t hitung senilai $-2,433$. Nilai t tabel sebesar $1,980$, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 118 ($df = n - k - 1$). Karna nilai dari t hitung diambil dari nilai mutlaknya, dengan demikian diketahui t hitung adalah $2,433 < t$ tabel $1,980$. Maka dapat disimpulkan H4 diterima yaitu Komite audit berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Hasil ini juga terbukti dari nilai Sig. $0,016 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa komite audit berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 8 didapat nilai t hitung senilai $-8,294$. Nilai t tabel sebesar $1,980$, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 118 ($df = n - k - 1$). Karna nilai dari t hitung diambil dari nilai mutlaknya, dengan demikian diketahui t hitung adalah $8,294 > t$ tabel $1,980$. Maka dapat disimpulkan H5 diterima yaitu komite manajemen risiko berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Hasil ini juga terbukti dari nilai Sig. $0,00017$ yang berarti Sig. $0,00017 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa komite manajemen risiko

berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan istitusional, komisaris independen, komite audit, dan komite manajemen risiko terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Ditunjukkan dengan nilai t hitung $2,641 < t$ tabel $1,980$. dan nilai Sig. $0,009 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swarte et.al. (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Kepemilikan Istitusional berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Ditunjukkan dengan nilai t hitung $3,241 > t$ tabel $1,980$. dan nilai Sig. $0,002 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Chariri (2013) yang berpendapat bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Ditunjukkan dengan nilai t hitung $1,414 > t$ tabel $1,980$. dan nilai Sig. $0,160 > 0,05$. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanusi et.al. (2017) yang berpendapat bahwa komisaris independen tidak

- berpengaruh pada penerapan manajemen risiko perusahaan.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Ditunjukkan dengan nilai t hitung $2,433 < t$ tabel $1,980$. dan nilai Sig. $0,016$ yang berarti Sig. $0,016 < 0,05$. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang et. al. (2013) menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.
 5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa komite manajemen risiko berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Ditunjukkan dengan nilai t hitung $8,294 > t$ tabel $1,980$. dan nilai Sig. 0 yang berarti Sig. $0 < 0,05$. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) menyatakan bahwa komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya di harapkan dapat memilih perusahaan dibidang atau disektor lain dalam mengukur pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko.
2. Di sarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan faktor atau variabel lain yang mampu untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap pengungkapan manajemen risiko, seperti: kepemilikan publik dan spesialisasi komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, D. dan M. Rivaldi. 2018. *Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure Dan Struktur Pengelolaan*

Terhadap Nilai Perusahaan. Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 11 No. 2.Hal.2

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. 333-343. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam, A. Falendro, dan Faisal. 2018. Karakteristik Dewan Komisaris, Komite dan Pengungkapan Risiko Perusahaan. *Jurnal Review dan Akuntansi Keuangan Vol. 8 No. 2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang.*

Gunawan, Barbara dan Zakiyah, Yulia Nurul.2017. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Risk Management Disclosure*. Ekspansi Vol.9, No.1 Universitas Muhammadiyah: Yogyakarta.

Hamdani, Mailani. 2016. *Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory*. SEMNAS FEKON Universitas Terbuka – Pondok Cabe

Jannah, Iin Manis Maidatul. 2016. *Pengaruh Tingkat Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas: Surabaya

Jensen, M. C., dan Meckling W. H. 1976. *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics University of Rochester, Rochester, NY 14627: U.S.A.

- Kusumaningrum, A.R., dan A. Chariri. 2013. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 2, Nomor 4 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang
- Nu Htay, S.N., H.M.A. Rashid, M.A. Adnan, dan A.K.M Meera. 2011. *Corporate Governance and Risk Management Information Disclosure in Malaysian Listed Banks: Panel Data Analysis*. International Review of Business Research Papers Vol. 7. No. 4 International Islamic University: Malaysia
- Roberto dan Tarigan, M.U.2013. *Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Publik, Tingkat Leverage Dan Tingkat Profitabilitas Terhadap Risk Management Disclosure (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Akuntansi, Volume 13 Nomor 2 Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara: Jakarta.
- Sanusi, Z.M., S.M. Nia, N.A. Roosle, R.N. Sari, dan A. Harjitok. 2017. *Effects of Corporate Governance Structures on Enterprise Risk Management Practices in Malaysia*. International Journal of Economics and Financial Issues Universiti Teknologi MARA: Malaysia
- Setiawan, Dedi. 2016. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan *Consumer Goods* di BEI Periode 2010-2015. Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas: Surabaya.
- Siahaan, Septony B.2017. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kualitas KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. ISSN : 2599-0136 Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist Volume 1, Nomor 1, 2017, 81-95.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Swarte, W., Lindrianasari, T.J. Prasetyo, Sudrajat, dan D. Fitra. 2019. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko*. *urnal Ekonomi dan Keuangan Universitas Lampung: Lampung*
- Trinanda, F.I., dan I. Anisykurlillah. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management*. *Accounting Analysis Journal* Vol 5 No 2 Universitas Negeri Semarang: Semarang
- Yatim, Puan.2010. *Audit Committee Characteristics And Risk Management Of Malaysian Listed Firms*. *Malaysian Accounting Review*, Vol. 8 No. 1, 19-36 Universiti Kebangsaan Malaysia: Malaysia
- Zhang, X. X., D. Taylor, W. Qu, dan V. Wise. 2013. *Institutional Ownership, Audit Committee and Risk Disclosure – Evidence from Australian Stock Market*. *Corporate Board: Role, Duties & Composition / Volume 9, Issue 3: Australia*

Undang-Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.	Komite Nasional Kebijakan Governance.2012. Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.